

BAB III

KEBIJAKAN EKONOMI LUAR NEGERI TAIWAN

Pasal 141 Konstitusi Taiwan menyatakan bahwa "Kebijakan luar negeri Taiwan, dalam semangat kemerdekaan dan inisiatif atas dasar prinsip kesetaraan dan timbal balik, menumbuhkan kerukunan yang baik dengan negara lain, dengan menghormati perjanjian dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara yang tinggal di luar negeri, mempromosikan kerjasama internasional, memajukan keadilan internasional dan menjamin perdamaian dunia". Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab atas segala kebijakan dan usaha diplomatik Taiwan, membela kedaulatan dan kepentingan nasional sesuai dengan Konstitusi. Segala upaya untuk menerapkan kebijakan dan mempromosikan hubungan luar negeri serta memperkuat status internasional Taiwan. (mofa.gov.tw, 2017)

Taiwan berdedikasi untuk secara aktif mempromosikan diplomasi sebagai perdamaian, menciptakan kemitraan yang berkelanjutan dengan sekutu diplomatik, memperdalam dan memperluas hubungan substantif di berbagai bidang dengan negara-negara yang memiliki nilai serupa, dan menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Hal ini dibuktikan dengan terus mencari partisipasi internasional yang diperluas, selagi memberikan kontribusi nyata kepada komunitas global, dan meningkatkan profil internasionalnya melalui kebijakan bantuan ekonomi dan kemanusiaan. Selain itu, Taiwan berusaha untuk mengambil bagian dalam mekanisme kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional, memperkuat hubungan dengan kawasan dan dunia, menciptakan lebih banyak peluang bisnis di luar negeri, dan mempromosikan transformasi ekonomi dan peningkatannya. Ini juga bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya dari sektor swasta, pemerintah daerah, generasi muda, dan industri untuk memajukan diplomasi bangsa yang

multi-aspek. Tujuan Taiwan adalah untuk mengubah diri menjadi model nilai-nilai Asia baru, berusaha untuk memperdalam demokrasi, memastikan pilihan bebas, mempromosikan inovasi yang berkelanjutan, dan menyelesaikan konflik secara damai.

A. Dinamika Perpolitikan dan Perdagangan Eksternal Taiwan

Perdagangan asing telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Taiwan yang cepat selama 40 tahun terakhir. Ekonomi Taiwan tetap berorientasi ekspor, jadi dia tergantung pada rezim perdagangan terbuka dan tetap rawan terhadap penurunan ekonomi dunia. Jumlah perdagangan total telah meningkat lebih dari lima kali lipat pada 1960an, menjadi hampir 10 kalilipat pada 1970an, dan dua kali lipat pada 1980an. Pada 1990an hanya melihat pertumbuhan yang sedang.

Dinamika ekonomi Taiwan juga dipengaruhi oleh permasalahannya dengan mainland-nya yaitu China. *“Free trade agreements have proliferated in East Asia over the past several years, but so far Taiwan has been excluded from this greater economic integration, largely because of its diplomatic status”* (cia.gov).

Taiwan dengan statusnya yang unik tak dapat dipungkiri merupakan salah satu "negara" yang begitu demokratis di Asia saat ini. Taiwan memiliki sistem politik yang berbeda dengan sistem politik di RRC, menggunakan asas demokrasi dan liberalisme yang umum digunakan negara-negara barat (Jiang, 2004).

China memegang peranan yang teramat penting dalam pengukuhan eksistensi Taiwan. China berusaha untuk menarik kembali Taiwan ke dalam RRC, atau setidaknya untuk mencegah deklarasi independen Taiwan. Dalam hal ini, China berusaha untuk menekan peran Taiwan di dunia internasional dan berusaha mengisolasi politik luar negeri Taiwan (Sutter, 2008: 191). Penekanan China terhadap Taiwan ini menyebabkan Taiwan ingin

menjadi pengatur yang berlegitimasi di daratan China (Overholt, 2008:143).

Hubungan diplomatik dengan negara-negara lain umumnya menggunakan jalur ekonomi dan perdagangan, sekaligus menjadi saluran hubungan diplomatik tidak resmi. Dinamika politik eksternal Taiwan berhubungan dengan relasi Taiwan dengan negara lain yang dilihat melalui beberapa poin signifikan, di antaranya:

- a) Di tandatanganinya *Taiwan Relation Act* pada 10 April tahun 1979 oleh Presiden Carter, yang didalamnya yang mengatur hubungan antara Taiwan dengan Amerika Serikat; dan
- b) Melalui *vacation diplomacy*, dimana dilakukan pemberian VISA ke negara-negara kecil untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Hal ini dapat dipahami sebagai sebuah bentuk upaya untuk menemukan celah adanya pengakuan internasional mengenai eksistensi Taiwan itu sendiri (Overholt, 2008).

Kemudian ekspor dikategorikan menjadi produk yang diijinkan dan dikontrol. Sebagai bagian dari kebijakan liberalisasi pemerintah. Ijin yang diberikan langsung dari *Board of Foreign Trade* ini berlaku selama 30 hari. Ekspor komoditi harus mengikuti peraturan dari (www.kdei-Taipei.org, 2014):

1. *Foreign Trade Act*,
2. *Enforcement Rules of the Foreign Trade Act*,
3. *Regulations Governing Export of Commodities*,
4. *Regulations Governing Export and Import of High-tech Commodities*,
5. *List of Commodities Subject to Export Restriction*,
6. *List of Commodities Entrusted to Customs for Export Examination*.

FDI (*Foreign Direct Investment*) atau investasi asing langsung biasanya bermula ketika suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Di Taiwan pun terdapat banyak investor asing yang masuk ke Taiwan. Dengan cara ini maka perusahaan dari suatu negara asal atau '*home country*' bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi atau '*house country*' baik sebagian ataupun seluruhnya.

Walaupun the ROC atau Taiwan hanya merupakan sebuah negara kecil (dilihat dari luas wilayah), namun statistik ekonomi dan perdagangan serta produk teknologi negara ini membuat dunia banyak tergantung ke pada Taiwan. Statistik ekonomi Taiwan memang fantastis, merupakan negara di Asia dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil sejak 3 dekade terakhir, perdagangan Taiwan membukukan total nilai sebesar 575 miliar dollar ditahun 2013, lebih dua kali lipat dari Indonesia. Statistik ekspor Taiwan ke Indonesia ditahun 2013 mencapai US \$.15 miliar dollar, dengan produk utama mesin, alat-alat listrik dan teknologi tinggi, sedangkan import Taiwan dari Indonesia sebesar US\$.7,15 miliar. Indonesia mengalami defisit perdagangan yang sangat besar dengan Taiwan mendekati US\$. 7,85 miliar dollar ditahun 2013. Eksport utama Indonesia ke Taiwan adalah kekayaan alam seperti minyak dan bahan tambang lainnya.

1. Kebijakan Industrialisasi Substitusi Impor

Merujuk pada argumentasi klasik teori perdagangan internasional berupa "*a logical impossibility*" yang menyatakan bahwa industri negara berkembang sebagai produsen bahan mentah berupa hasil pertanian dan pertambangan tidak akan mungkin mampu berkompetisi dengan industri negara maju kecuali dengan diterapkannya kebijakan proteksi terhadap industri tersebut.

Dalam kasus kebijakan industri Taiwan misalnya, maka posisinya adalah harus tepat menentukan pilihan kebijakan, apakah akan mengambil pola kebijakan substitusi impor (*inward-looking*) atau kebijakan orientasi ekspor (*outward-looking*) yang terjadi pada tahun 1950. (Tsiang, 1986)

Terdapat dua instrumen utama yang dijadikan pijakan dalam mengambil kebijakan substitusi impor yang diterapkan di Taiwan yaitu kebijakan nilai tukar mata uang tahun 1950-an dan kebijakan penetapan harga yang lebih tinggi bagi barang impor terhadap ekspor.

Untuk instrumen kebijakan nilai tukar mata uang mulai diterapkan tahun 1949 dengan menetapkan US\$ 1 = NT\$ 5, disamping penerbitan *Exchange Settlement Certificate* yang dapat dinegosiasikan di pasar dan dijual ke Bank Taiwan dengan menggunakan nilai tukar resmi. (Shirley, 1983)

2. Kebijakan Industrialisasi Orientasi Ekspor

Pada tahun 1956-1960 Taiwan melakukan perubahan kebijakan pembangunan yaitu dengan diimplementasikannya 19 butir reformasi di bidang ekonomi dan keuangan serta pemberian insentif investasi untuk tercapainya target pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 8 persen yang mencakup beberapa substansi seperti :

- Satuan ukuran pengawasan indikator ekonomi ditinjau ulang.
- Diberlakukannya perlakuan khusus kepada pebisnis dalam hal pajak, nilai tukar dan keuangan.

- Reformasi sistem dan administrasi perpajakan untuk pembentukan modal.
- Reformasi sistem nilai tukar dan perdagangan untuk membentuk sistem nilai tukar tunggal dan liberalisasi kontrol perdagangan.
- Pembakuan sistem penerimaan devisa negara dari para eksportir dan menjalin hubungan dengan organisasi bisnis di luar negeri.

3. Kebijakan Integrasi Ekonomi Global

Dalam rangka untuk berpartisipasi dalam integrasi ekonomi regional serta mempertahankan keunggulan kompetitif, dan mengamankan posisi negara dalam rantai produksi global, Taiwan aktif berpartisipasi dalam negosiasi multilateral, plurilateral, dan bilateral, serta integrasi regional pada masalah ekonomi dan perdagangan. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri Taiwan berkomitmen terkait beberapa kebijakan penting berikut ini: (mofa.gov.tw, 2017)

A. Negosiasi perdagangan multilateral

Taiwan berusaha memperluas hubungan ekonomi dan perdagangan eksternal melalui negosiasi multilateral di bawah kerangka WTO. Pada Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9, yang diadakan di Bali, Indonesia pada 3-7 Desember 2013, Paket konferensi Bali tentang fasilitasi perdagangan, pertanian, dan pembangunan telah diterima untuk dijalankan. Dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-10, yang diadakan pada tahun 2015, Paket konferensi Nairobi disahkan, dengan menyadari peningkatan pada isu-isu seperti pertanian, kapas, dan pengembangan negara-negara terbelakang. Sebagai tambahan, Taiwan memainkan peran aktif dalam konsultasi untuk kesepakatan multilateral pertama WTO yang harus diselesaikan

yakni adalah Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, yang mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.

II. Negosiasi perdagangan bilateral

Untuk mempercepat liberalisasi perdagangan, Taiwan secara aktif berpartisipasi dalam negosiasi tentang perjanjian perdagangan *plural*. Ekonomi Taiwan telah menjadi pihak dalam Perjanjian Pengadaan Pemerintah dan perluasan Perjanjian Teknologi Informasi. Dengan berpartisipasi dalam konsultasi untuk Perjanjian Barang Lingkungan dan Perdagangan dalam Perjanjian Layanan, pemerintah Taiwan berharap dapat menciptakan peluang bisnis untuk industri jasa dan barang terbaharukan.

III. Perjanjian kerjasama ekonomi bilateral

Tahun 2017, Taiwan telah menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi bilateral dengan Paraguay tepatnya pada 12 Juli. Kemudian pada tahun 2013, Taiwan menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi bilateral dengan Selandia Baru dan Singapura tepatnya pada tanggal 10 Juli dan 7 November. Pemerintah Taiwan juga terus menjajaki perjanjian kerjasama perdagangan lainnya dengan mitra dagang utama lainnya.

IV. Partisipasi dalam integrasi ekonomi regional

Pemerintah internal memiliki tujuan untuk memperkuat hubungan global dan regional Taiwan, melalui cara dengan aktif berpartisipasi dalam kerja sama ekonomi multilateral dan bilateral, serta negosiasi perdagangan bebas, seperti Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Kementerian Luar

Negeri telah menginstruksikan misi luar negerinya untuk mengumpulkan dukungan dari anggota CPTPP dan RCEP untuk membantu membuka jalan bagi akses Taiwan untuk melakukan kerjasama perjanjian perdagangan regional ini.

Selain erat mengikuti perkembangan terbaru dalam integrasi ekonomi regional, Kementerian Luar Negeri Taiwan juga akan terus bekerja dengan instansi terkait untuk meninjau dan memperbarui peraturan domestik untuk lebih meliberalisasi rezim perdagangan. Dengan demikian, Taiwan dapat meletakkan dasar bagi penandatanganan perjanjian ekonomi bilateral dengan mitra dagang lainnya dan partisipasi dalam integrasi ekonomi regional di masa depan dalam rangka membangun hubungan diplomasi secara informal.

B. Kebijakan Diplomasi Ekonomi dan Perdagangan

Perencanaan pembangunan nasional Taiwan berada di bawah kendali satu lembaga yang disebut dengan CEPD (*Council for Economic Planning and Development*). Secara fungsional CEPD membuat dua buah rencana umum yakni rencana bagian atas (*upper*) yaitu makro ekonomi dan rencana bagian bawah (*lower*) yaitu sektoral. Beberapa rencana yang termasuk dalam makroekonomi adalah menganalisis situasi subjektif dan objektif internasional dan isu local yang dihadapi; pembuatan visi dan tujuan umum; serta pilar-pilar utama kebijakan pemerintah. Di sisi yang lebih khusus, rencana sektoral diantaranya adalah mencakup sektor ekonomi; pendidikan, sains dan teknologi; ekologi dan lingkungan; sosial serta hukum. (mofa.gov.tw, 2017)

Secara kelembagaan kewenangan CEPD mencakup poin-poin utama rencana implementasi lembaga-lembaga eksekutif di bawahnya yakni sebanyak

39 badan yang berurusan dengan urusan dalam negeri, kebijakan luar negeri, pertahanan nasional, perekonomian, anggaran dan keuangan, dll.

Beberapa prinsip perencanaan yang dijadikan dasar bagi kebijakan CEPD antara lain adalah: Pertama, *forward looking*, yaitu bahwa kebijakan harus menjangkau tren di masa depan serta membuka cakrawala baru; Kedua, *holistic*, artinya pembangunan ekonomi harus selaras dengan pembangunan social, budaya dan lingkungan, serta memberikan tekanan pada keterbukaan, keberlanjutan, dan keadilan, dalam rangka mencapai tujuan pertumbuhan, stabilitas dan distribusi pendapatan yang merata; Ketiga, *continous*, yaitu keterkaitan rencana yang sedang berjalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang; Keempat, *consistent*, yaitu menyelaraskan pembagian tugas antara sektor publik dan sektor swasta serta menyelaraskan penggunaan sumber daya ekonomi, memelihara konsistensi antara rencana makro dan sektoral, serta konsistensi antara tujuan kebijakan dan ukuran-ukurannya. (mofa.gov.tw, 2017)

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan ekonomi Taiwan dibagi dalam tiga kategori, yakni pandangan jangka panjang, rencana jangka menengah, serta rencana tahunan. Pandangan jangka panjang mencakup rencana sepuluh tahun atau lebih, dengan tujuan memberikan visi dan arahan pembangunan nasional jangka panjang. Rencana jangka menengah adalah rencana empat tahunan, yaitu memetakan fase-fase tujuan kebijakan serta memetakan proyek pembangunan terkait yang selaras dengan kerangka dengan visi dan arahan pandangan jangka panjang. Rencana tahunan bertujuan menyelesaikan masalah partikulier dan jangka pendek yang sesuai dengan arah pembangunan jangka menengah. Program kerja yang dirancang sangat praktis dan realistis sebagai pemenuhan

tujuan jangka menengah dan jangka panjang yang dipenuhi dari tahun ke tahun.

Menarik investasi asing juga merupakan salah satu tugas penting dalam diplomasi ekonomi. Misi Taiwan di luar negeri juga mempromosikan perdagangan luar negeri dengan membantu perusahaan Taiwan mengeksplorasi peluang bisnis di luar negeri dan menjadi tuan rumah dan berpartisipasi dalam acara perdagangan internasional. Kementerian Luar Negeri telah mengatur delegasi ekonomi dan perdagangan untuk bepergian ke luar negeri, membantu perusahaan kecil dan menengah Taiwan untuk mendapatkan pijakan di pasar negara berkembang, dan mempromosikan Kebijakan Baru *Southbound* dan inisiatif Industri Inovatif 5 + 2, sehingga menarik investasi asing dan mendorong perusahaan melakukan perjanjian kerjasama investasi dengan Taiwan. (Affairs, 2017)

Dalam rangka memperkuat vitalitas dan otonomi ekonomi Negara, Taiwan memperkuat koneksi global dan regional secara berkelanjutan, dan untuk menempa rasa memiliki dalam "komunitas ekonomi" bersama dengan anggota lain dari berbagai wilayah di belahan dunia. Kementerian Luar Negeri dan misinya di luar negeri telah menempatkan dan mempromosikan perdagangan luar negeri Taiwan dan menarik investasi langsung atau *Foreign Direct Investment* dalam agenda.

Banyak negara di seluruh dunia membangun aliansi untuk mengatasi tren perdagangan dengan lebih baik dan liberalisasi investasi global. Karena lingkungan persaingan bisnis yang ketat ini, Presiden Tsai telah menjadikan transformasi struktur ekonomi Taiwan tugas pertama dari pemerintahan baru. Dia juga menginstruksikan otoritas yang relevan untuk berpartisipasi dalam kerjasama ekonomi bilateral dan regional serta negosiasi perdagangan bebas. Taiwan akan memainkan peran aktif dalam kerja sama ekonomi

internasional dan perdagangan dan pembuatan aturan, dengan gigih mempertahankan tatanan ekonomi global, dan berintegrasi ke dalam perdagangan regional dan arsitektur komersial penting, termasuk Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) dan Regional Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Taiwan telah merencanakan kontribusi besar terhadap penyesuaian struktural dan pembangunan berkelanjutan. (mofa.gov.tw, 2017)

Untuk tujuan ini, maka para diplomat Taiwan telah mempromosikan perdagangan dan investasi Taiwan di luar negeri. Melalui jaringan pengusaha Kementerian Luar Negeri dan perwakilan komunitas Cina di luar negeri, mereka membantu meningkatkan FDI dan menghasilkan peluang bisnis di luar negeri untuk perusahaan Taiwan.

Selain dari pada itu perkembangan perencanaan pembangunan ekonomi Taiwan telah terbagi ke dalam enam tahap penting, yaitu: (Yenni, 2014)

- Pertama, era 1950-an: Tahap pengejaran stabilitas dan kemandirian.
Pada tahap ini prioritas pembangunan ditekankan pada stabilisasi ekonomi dan produksi makanan. Taiwan mendorong pembangunan industri domestik melalui kebijakan tarif dan kendali impor. Program *land reform* diperkenalkan untuk meningkatkan produksi makanan, menstabilkan harga makanan, serta meningkatkan stabilitas sosial. Di saat yang sama, pembangunan industri substitusi impor (ISI) yang padat karya diperluas untuk mengurangi ketergantungan atas impor dan kebutuhan devisa.

- Kedua, era 1960-an: Tahap peningkatan ekspor industry ringan.

Tekanan tahap ini diberikan pada penciptaan industri padat karya dan berorientasi ekspor dalam rangka memanfaatkan tenaga kerja murah yang tersedia serta disamping juga guna merambah pasar potensial di luar Taiwan. Pemerintah juga melakukan reformasi kebijakan sistem nilai tukar dan perpajakan, serta pada 1966 mendorong investasi dan ekspor melalui pendirian *Export-Processing Zone* pertama Taiwan di Kaohisung. Dampak positif EPZ dapat dilihat pada tingginya pertumbuhan ekspor yang merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi.

- Ketiga, era 1970-an: Tahap pembangunan industri dasar dan industri berat.

Cepatnya ekspansi ekspor di era sebelumnya menciptakan permintaan domestik yang besar untuk mesin, peralatan dan produk. Pemerintah Taiwan secara aktif menyelesaikan proyek sepuluh pembangunan utama diantaranya rel, pelabuhan, bandara, listrik dan infrastruktur dasar lainnya, serta secara antusias membangun industri petrokimia, baja, dan industri substitusi impor sedang yang padat modal. Hasilnya, Taiwan dapat mengurangi secara efektif ketergantungannya pada *supply* asing atas produk antara dan dengan cepat meningkatkan struktur industrinya.

- Keempat, era 1980-an: Tahap liberalisasi ekonomi dan pembangunan berbasis teknologi.

Pada tahap ini Taiwan telah menuai hasil dari kebijakan promosi perdagangannya, dan mencatat surplus perdagangan luar negeri. Pemerintah mengadopsi liberalisasi dan internasionalisasi

ekonomi sebagai prinsip acuan bagi pembangunan Taiwan ke depan, serta berusaha bermain secara aktif di pasar dunia. Pada saat yang sama, Taiwan mulai memaksimalkan sumberdaya kapitalnya untuk membangun industri padat modal dan padat teknologi seperti industri elektronik, informasi, dan mesin. Produksi industri direstrukturisasi dengan meningkatkan belanja litbang (R&D).

- Kelima, era 1990-an Tahap *booming* perkembangan industri IT.

Beberapa industri padat karya dipindahkan ke negara lain (*offshore*) akibat tingginya tingkat upah domestik. SDM Taiwan yang berkualitas tinggi dan kluster industri yang melimpah dikerahkan pada pembangunan industri IT. Hasilnya, pada 1993 Taiwan menjadi produsen terbesar dunia beberapa produk IT, dan menyuplai lebih dari separuh kebutuhan pasar global untuk layar monitor, motherboards dan scanner.

Pada 1995 industri IT Taiwan menjadi produsen terbesar ketiga dunia untuk *hardware* IT dan memainkan peran vital dalam industri high-tech dunia. Pemerintah juga memperkenalkan *Asia-Pacific Regional Operations Center* (APROC) dengan tujuan meningkatkan posisi global Taiwan dan level industrinya. Kebijakan lainnya pada tahap ini adalah liberalisasi telekomunikasi, pembangunan ekonomi dan sosial yang berimbang guna peningkatan kualitas hidup warga.

- Keenam, era 2000-2011: Tahap *remodeling industry* dan keterkaitan global.

Taiwan secara aktif meningkatkan stok modal nasional dengan memperluas investasi publik dan

mendorong investasi swasta. *Industrial remodeling* didorong dengan jalan membangun enam industri utama, empat industri canggih, dan sepuluh industri jasa.

Taiwan mempercepat koneksi global dan meningkatkan kapabilitas logistik globalnya melalui penandatanganan ECFA dengan China daratan, serta membawa ekonomi nasional ke dalam kancah dunia.

Selain itu Taiwan mengimplementasikan *Golden Decade National Vision Plan* dengan tiga puluh satu perangkat utama dalam rangka mencapai delapan visi ekonomi, masyarakat yang adil, pemerintahan yang bersih dan kompeten, pendidikan budaya yang unggul, lingkungan yang *sustainable*, pembangunan yang komprehensif, dan perdamaian di selat China dan internasional, dalam rangka menciptakan kesejahteraan, keselarasan dan kesinambungan.

1. Kebijakan *Asian Silicon Valley*

Untuk menghubungkan Taiwan ke kelompok teknologi global dan menciptakan industri baru untuk generasi berikutnya, Pemerintah Taiwan meluncurkan Rencana Pengembangan Kebijakan *Asia Silicon Valley* pada bulan September 2016.

Kebijakan ini memiliki dua tujuan utama: pertama, mempromosikan inovasi dan R & D untuk perangkat dan aplikasi *internet of things* (IoT), dan kedua, meningkatkan ekosistem startup dan kewirausahaan Taiwan. Rancangan ini juga akan membentuk tiga tautan (lokal, global dan masa depan) melalui empat strategi berikut Ketiga tautan itu berarti menggabungkan industri lokal bersama-sama, untuk menghubungkan Taiwan dengan dunia, dan membangun hubungan ke masa depan.

Rencananya akan mengubah struktur industri Taiwan dengan IoT, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan inovasi dan kewirausahaan.

Empat strategi implementasi adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan ekosistem startup dan kewirausahaan Taiwan dengan meningkatkan pasokan bakat inovatif, menyediakan modal ekspansi bisnis, dan menyesuaikan hukum dan peraturan yang relevan untuk lingkungan startup.
2. Tingkatkan keterkaitan dengan kluster ternama di seluruh dunia dengan menempe hubungan dengan kemampuan R & D *Silicon Valley* dan kelompok inovasi global lainnya. Sementara itu, berpartisipasi aktif dalam perumusan standar internasional dan sertifikasi teknologi terkait IoT.
3. Membangun rantai pasokan IoT lengkap dengan Mengintegrasikan keunggulan perangkat keras Taiwan ke dalam aplikasi perangkat lunak. Ini juga akan mendorong untuk mengkomersilkan temuan penelitian dari universitas dan lembaga penelitian.
4. Bangun situs demonstrasi yang beraneka ragam untuk produk dan layanan cerdas dengan membangun lingkungan internet yang berkualitas, membangun tempat tidur cerdas terdiversifikasi, dan mengembangkan aplikasi berdasarkan logistik cerdas, transportasi cerdas, dan perawatan kesehatan yang cerdas.

Dengan dampak gabungan dari rencana *Asia Silicon Valley* dan rencana ekonomi digital lainnya, pangsa pasar global IoT Taiwan diproyeksikan tumbuh dari 3,8 persen pada 2015, menjadi 4,2 persen pada 2020, dan menjadi 5 persen pada 2025.

Rencananya juga bertujuan untuk tumbuh 100 perusahaan sukses — baik perusahaan lokal yang menikmati jalan keluar atau pusat R & D yang sukses yang didirikan oleh perusahaan besar. Tujuan lainnya termasuk membangun tiga integrator sistem global di Taiwan, menarik investasi dari dua perusahaan internasional kelas dunia, dan menciptakan platform pembelajaran online untuk sektor terkait IoT. Empat industri inovatif lainnya yang ditunjuk sebagai inti industri masa depan Taiwan meliputi bidang mesin pintar, teknologi hijau, teknologi biomedis dan pertahanan nasional. (ndc.gov.tw, 2017)